

## **Diplomasi Asia Timur Terhadap Vietnam dalam Kerangka ASEAN pada Kepemimpinan Xi, Lee-Park-Moon, dan Abe (2012-2020)**

Darynaufal Mulyaman<sup>1</sup>, Yonathan Manulang<sup>2</sup>, William Sulistywo Wibowo<sup>3</sup>,  
Jason Rafael Setia Djaya<sup>4</sup>, Yesi Riana Yusnita Sari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjend Soetoyo

surel:

[darynaufal.mulyaman@uki.ac.id](mailto:darynaufal.mulyaman@uki.ac.id), [yonathanmanullang2000@gmail.com](mailto:yonathanmanullang2000@gmail.com), [willsulis06@gmail.com](mailto:willsulis06@gmail.com), [jason.rafael16@gmail.com](mailto:jason.rafael16@gmail.com), [yesiriana11@gmail.com](mailto:yesiriana11@gmail.com)

### **Abstrak**

Hubungan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan ASEAN selalu memiliki keunikan yang tersendiri. Berbeda dengan hubungan bilateral rumit yang lumrah terjadi di negara-negara Asia Timur, Asia Timur dan ASEAN cenderung terbebas dari masalah (kecuali masalah Laut China Selatan). Di antara 10 anggota ASEAN, Vietnam adalah salah satu negara yang berpotensi dalam hubungan Asia Timur dan ASEAN. Selaras dengan perubahan lanskap politik regional yang berasal dari dinamika global, ambiguitas komitmen AS terhadap Asia Tenggara, dan melemahnya kerangka kerja multilateral yang efektif untuk manajemen konflik di kawasan ini, dirasa perlu bagi ASEAN, terutama Vietnam dan Asia Timur untuk memperkuat strategi kemitraan mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap sejumlah kekuatan ekonomi, keamanan, dan strategi pertahanan yang menjadi perhatian bersama. Makalah ini menganalisis bagaimana negara-negara Asia Timur membentuk suatu kemitraan strategi mereka dengan Vietnam dalam kebijakan luar negeri dan kemungkinan – kemungkinan untuk membangun hubungan di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa ada peluang bagi Kemitraan Strategis Vietnam-Jepang untuk memanfaatkan potensi hubungan secara penuh dan melampaui situasi saat ini.

**Kata Kunci :** Kerja Sama, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, ASEAN

### **ABSTRACT**

China, Japan, and South Korea's relationship with ASEAN has always had its own distinctiveness. In contrast to the complicated bilateral relations that are common in East Asian countries, East Asia and ASEAN tend to be trouble-free (except for the South China Sea issue). Among the 10 ASEAN members, Vietnam is one of the potential countries in East Asia and ASEAN relations. In line with the changing regional political landscape stemming from global dynamics, the ambiguity of the U.S. commitment to Southeast Asia, and the lack of an effective multilateral framework for conflict management in the region, it is necessary for ASEAN, especially Vietnam and East Asia to strengthen their strategic partnerships as a form of protection against several economic forces, security, and strategic challenges of common concern. *This paper analyses how East Asian countries formed their strategic partnership with Vietnam in foreign policy and the possibilities for future relationship building.* This is in line with the view that there is an opportunity for the Vietnam-Japan Strategic Partnership to make full use of the potential of the relationship and go beyond the current situation.

**Keywords :** Cooperation, China, Japan, South Korea, Vietnam, ASEAN

## PENDAHULUAN

Dalam jurnal ilmiah ini, kita akan membahas bagaimana Vietnam, salah satu anggota ASEAN, berinteraksi dengan negara-negara Asia Timur lainnya seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Hubungan Vietnam dengan tiga negara Asia Timur yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, Presiden Lee Park-Moon dari Korea Selatan, dan Shinzo Abe dari Jepang, akan menjadi topik utama liputan jurnal ini pada tahun 2012-2020. Kajian dalam jurnal ini akan berkonsentrasi pada bagaimana konteks sejarah, lokasi geografis, sosial, dan budaya, serta hubungan bilateral kedua negara, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.

Pertama, kita akan melihat dari sudut pandang Vietnam dalam hubungannya dengan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki sejarah serupa dalam berbagai hal, secara geografis terletak di kawasan Asia-Pasifik, memiliki hubungan bilateral yang telah berlangsung lama, dan memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya yang serupa. Sebagai bagian dari hubungan baik yang telah terjalin, Korea Selatan dan Vietnam sering mengadakan program pertukaran pelajar, usaha bisnis dan investasi, pertukaran budaya, dan acara lainnya. Baik Korea Selatan maupun Vietnam menunjukkan keunggulan alami yang saling melengkapi dan meningkatkan aktivitas ekonomi kedua negara dalam hal hubungan perdagangan bilateral. Meskipun Korea Selatan terkenal dengan kemampuannya memproduksi barang dan jasa berteknologi tinggi yang kompetitif dan telah diakui kualitasnya di pasar global, Vietnam adalah negara yang kompetitif, efektif, dan kaya sumber daya. Dengan demikian, hubungan kedua negara akan memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi kesejahteraan warga negaranya.

Topik kedua yang dibahas dalam jurnal ini adalah hubungan bilateral antara Tiongkok dan Vietnam. Tiongkok dan Vietnam adalah dua negara yang pemerintahannya sama-sama menganut ideologi komunis. Namun, terlepas dari kesamaannya, kedua negara juga terlibat dalam perang yang melibatkan bentrokan antar

militer. Perang Tiongkok-Vietnam yang pecah pada tahun 1979 hanya berlangsung selama satu bulan (Februari-Maret). Namun, sejarah konflik antara Tiongkok dan Vietnam tampaknya tidak banyak berdampak pada hubungan bilateral kedua negara. Akan mudah bagi Tiongkok dan Vietnam untuk menjalin kerja sama yang lebih luas karena, sebagaimana telah disebutkan, kedua negara ini memiliki karakteristik mendasar sebagai negara komunis.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat saat itu masih tegang akibat Perang Vietnam, hubungan kedua negara mungkin berkembang selain memiliki kesamaan karakteristik fundamental atau ideologis. Karena embargo perdagangan dan pembatasan bantuan ekonomi untuk Vietnam yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pada saat itu, Amerika Serikat tidak dapat sepenuhnya memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi Vietnam. Pada saat itu, hubungan diplomatik Amerika dengan Vietnam sangat terbatas. Oleh karena itu, Vietnam secara aktif mencari mitra bisnis baru yang dapat membantu pemulihan perekonomiannya, khususnya setelah periode konflik yang berkepanjangan. Setelah konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat, Vietnam kemudian mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan Uni Soviet dan Tiongkok dalam upaya untuk menemukan kembali perekonomian nasionalnya dan mencari cara lain untuk melawan blokade perdagangan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Terakhir, jurnal ini akan membandingkan sikap tiga negara Asia Timur terhadap ASEAN, khususnya *Vietnam menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri masing-masing negara secara keseluruhan berkaitan dengan kemitraan strategisnya dengan Vietnam dan potensi untuk mengembangkan hubungan tersebut*. Berbeda dengan hubungan Vietnam dengan negara-negara Asia Timur lainnya, kami berpendapat bahwa terdapat peluang bagi Kemitraan Strategis antara Vietnam dan Jepang untuk mencapai potensi maksimalnya.

Beberapa jurnal yang meneliti hubungan antara Vietnam dan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan diperiksa dalam studi literatur kami. Yang pertama adalah jurnal yang berfokus pada bagaimana kesamaan sejarah antara Korea Selatan dan Vietnam dapat memperkuat hubungan mereka. Dalam artikelnya tahun 2014, *Persamaan Vietnam dan Korea Selatan - Kaitannya dengan Kemitraan Kerjasama Strategi dan Arah Masa depannya*, Bach Thi Ngoc Trang membahas hubungan erat antara Vietnam dan Korea. Kedua negara telah membina kerja sama di sejumlah bidang, termasuk perdagangan, kebudayaan, dan pariwisata, melalui interaksi antar masyarakat. Ia menemukan bahwa kesamaan psikologi, pemikiran, dan gaya hidup Vietnam dan Korea meningkatkan kerja sama strategis, kemitraan, dan orientasi masa depan.

Argumen serupa dikemukakan oleh Dr. Nguyen Hoang Tien dan Dr. Dinh Ba Hung Anh dalam jurnal mereka tahun 2019, *Hubungan Ramah dan Berbasis Kemitraan Antara Vietnam dan Korea Selatan Alam, Perkembangan Saat Ini, dan Prospek Masa Depan*. Mereka menjelaskan bahwa ketika negara-negara lain mengalami fluktuasi hubungan, hubungan Vietnam dan Korea Selatan terus meningkat. Hal ini juga didukung oleh opini publik kedua negara yang saling berpihak.

Vietnam dan Jepang telah menjalin persahabatan sejak lama. Hubungan Jepang dan Vietnam berjalan damai, namun menurut Thuy Thi Do in *Menemukan Kemitraan Strategis Vietnam-Jepang dalam Perubahan Lanskap Politik Asia Timur*, dinamika lanskap politik regional yang disebabkan oleh meningkatnya unilateralisme dan ketegangan Tiongkok dalam sengketa wilayah, ambiguitas komitmen Amerika Serikat terhadap Asia, dan kurangnya kerangka kerja multilateral yang efisien dalam pengelolaan konflik di kawasan akan mendorong kedua negara untuk melakukan hal yang sama. kemitraan yang lebih erat.

Peran Jepang terhadap Vietnam pada saat pengaruh AS di kawasan melemah juga

dicermati oleh Keiko Hirata dalam *Jepang sebagai Negara Reaktif?: Menganalisis Hubungan Jepang dengan Republik Sosialis Vietnam*. Jepang berharap Vietnam akan menjadi penghubung antara Asia Tenggara yang kapitalis dan Indochina yang komunis. Hannah Cotillon menulis tentang nasionalisme dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain dalam artikelnya tentang hubungan Vietnam-Tiongkok. Dalam *Sengketa Wilayah dan Nasionalisme: Studi Kasus Komparatif Tiongkok dan Vietnam (2017)*, Cotillon mengeksplorasi bagaimana nasionalisme di kedua negara berkontribusi terhadap klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan dan meningkatnya konflik dengan Vietnam. Hubungan Vietnam-Tiongkok menjadi tegang akibat konflik ini.

Dalam artikel jurnalnya tahun 2020 *Peningkatan Kemampuan Militer Vietnam Pada Tahun Sengketa Laut Cina Selatan: Perlombaan Senjata atau Status Quo?*, Putti Ananda Hiswi juga menyampaikan pandangan senada. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara kedua negara merupakan sebuah tantangan karena klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan telah mendorong Vietnam untuk membalas dengan operasi militer untuk mempertahankan wilayahnya. Oleh karena itu, berdasarkan kajian literatur yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa masih diperlukan adanya tulisan ilmiah yang dapat menganalisis keterkaitan Korea, Jepang, dan Tiongkok dengan Vietnam secara detail..

Menurut Jonathan Daniel London dalam jurnalnya tahun 2014 *Politik di Vietnam Kontemporer*, Vietnam adalah contoh negara satu partai yang menerapkan hukuman berat bagi perilaku pembangkang. Hal ini menunjukkan betapa diktatornya sistem politik di Vietnam. Namun, selain gambaran sederhana ini, tidak ada yang diketahui tentang politik Vietnam. Politik Vietnam rumit dan dinamis. Namun sering kali, persepsi umum mengenai politik di Vietnam bersifat sederhana, ketinggalan jaman, atau keduanya. Dalam literatur mengenai politik komparatif, Vietnam seringkali diabaikan. Vietnam

tampak kecil dan tidak penting jika dibandingkan dengan Tiongkok. Sangat mudah untuk mengabaikan atau mengabaikan fakta bahwa Vietnam saat ini adalah negara dengan populasi terbesar ke-13 di dunia dan, sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang konsisten selama dua dekade, kini Vietnam dianggap sebagai salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah. Vietnam adalah negara yang penting dan kebijakannya berbeda dengan kebijakan Tiongkok. Memang benar bahwa penyelidikan komparatif dan konseptual mengenai perbedaan antara Vietnam dan Tiongkok diperlukan. Karena aksesibilitasnya yang sulit, politik Vietnam tetap bersifat rahasia. Pemimpin negaranya selalu menimbulkan kecurigaan dan menolak pengawasan dari luar. Meskipun fokusnya adalah pada analisis situasi sosial dan ekonomi di negara tersebut, Vietnam telah menjadi lebih mudah diakses selama 20 tahun terakhir, dan kini terdapat banyak sekali literatur ilmiah mengenai ekonomi politik negara tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam makalah ini, kami menggunakan metode analisis kualitatif yang memberikan serangkaian justifikasi untuk studi kasus. Selain itu, George dan Bennett mencatat dalam Prakash dan Klotz (2008) bahwa ketika menggunakan pendekatan kualitatif dalam hubungan internasional, satu atau lebih hubungan luar negeri biasanya diperiksa sambil menggunakan proses pengambilan keputusan yang dipetakan untuk menilai komponen dan tingkat interpretasi pengambilan keputusan. pada berbagai tingkat logis. Oleh karena itu, studi kasus tunggal mungkin berasal dari masalah empiris. Oleh karena itu, kami akan menyelidiki kasus perbandingan melalui serangkaian deskripsi kasus sebelum sampai pada suatu kesimpulan pada akhirnya.

#### **KERANGKA TEORITIS**

Lebih lanjut, dalam kerangka teori, kami mengikuti sudut pandang liberal untuk memahami situasinya. Prinsip dasar liberalisme adalah bahwa masyarakat pada dasarnya bersifat kooperatif satu sama lain.

Kaum liberal secara konsisten menjaga prinsip-prinsip perdamaian global, yang dapat dicapai melalui kerja sama antar negara dan keamanan bersama (Keohane, 1989). Mengingat bahwa politik dalam negeri dan luar negeri mempunyai potensi untuk mempengaruhi sistem internasional, pendekatan liberal memandang keduanya sama pentingnya. Perspektif liberalisme kemudian menegaskan bahwa aktor non-negara juga memainkan peran penting dalam urusan internasional dan bukan satu-satunya pemain yang melakukan hal tersebut. Prinsip-prinsip dasar kebebasan individu, akal budi, moralitas, hak asasi manusia, kesempatan, dan persamaan hak bagi semua orang adalah bagian dari liberalisme. Realisme dan liberalisme memiliki arti yang sangat berbeda. Bisa dikatakan, hal ini disebabkan oleh pandangan positif liberalisme terhadap masa depan negara, seperti kerja sama dan lain-lain. Kaum liberal pada umumnya menganut keyakinan bahwa ketika orang memanfaatkan kecerdasan mereka, mereka dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Konflik bisa saja selesai. Optimisme liberal dan perkembangan negara modern berjalan beriringan. Kemajuan dalam sebagian besar aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan internasional, merupakan hasil dari modernisasi.

Ada beberapa aliran liberalisme, termasuk liberalisme sosiologis, yang berpendapat bahwa hubungan internasional harus mencakup analisis hubungan antara masyarakat, kelompok, dan sektor swasta selain hubungan antar pemerintah. Masyarakat cenderung lebih banyak bekerja sama satu sama lain dibandingkan dengan pemerintah. Dunia akan lebih damai jika terdapat banyak jaringan internasional. Yang kedua adalah liberalisme interdependensi, yang berpendapat bahwa modernisasi meningkatkan independensi internasional. Kekuatan militer merupakan alat yang kurang efektif, aktor-aktor transnasional menjadi lebih signifikan, dan kesejahteraan, bukan keamanan, adalah tujuan utama negara. " Saling ketergantungan yang kompleks " mengacu pada lingkungan hubungan internasional yang lebih tenang.

Yang ketiga adalah liberalisme kelembagaan, yang berpendapat bahwa lembaga-lembaga internasional mendorong kerja sama internasional. Tantangan-tantangan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antar negara akan dikurangi oleh institusi-institusi, begitu pula ketakutan yang diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan tersebut. Liberalisme Partai Republik, yang berpendapat bahwa negara-negara demokratis tidak berperang satu sama lain, berada di urutan keempat. Hal ini merupakan hasil dari budaya domestik dalam penyelesaian konflik secara damai, prinsip-prinsip moral yang sama, dan kerja sama ekonomi yang positif serta hubungan yang independensi.

Pengendalian diri, moderasi, kompromi, dan tantangan terhadap perdamaian atau perang global merupakan dasar dari liberalisme (Dunne dalam Bayliss & Smith, 2001: 164). Meskipun Pemerintah dan Negara tidak diragukan lagi penting dalam proses internasional, Liberalisme menolak sentralisasi aktor dalam Hubungan Internasional pada dua entitas saja, menurut Steans, Pettiford, dan Diez (2005). Pemain non-negara, termasuk MNC, IGO, LSM, gerilyawan, dan warga negara, memainkan peran penting dalam cara suatu negara berinteraksi dan melakukan hubungan internasional.

Hal ini sangat terkait dengan kerja sama atau aktivitas diplomasi yang terjadi antara negara dan aktor non-negara. Setiap negara mempunyai tujuan masing-masing dalam upaya memperbaiki diri. Elemen terpenting dalam hubungan kedua negara adalah kerja sama. Konflik merupakan salah satu komponen ilmu hubungan internasional, dan kerja sama internasional merupakan salah satu komponennya karena merupakan komponen soft power yang digunakan negara lain untuk mengintegrasikan negara lain secara politik. Dalam situasi ini, kerja sama akan berdampak pada berbagai faktor lain, termasuk politik, budaya, dan hubungan antar negara.

Untuk memperoleh pemahaman umum tentang bagaimana negara-negara Asia Timur menempatkan kemitraan strategis mereka

dengan Vietnam dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara secara keseluruhan serta potensi untuk mengembangkan hubungan tersebut di masa depan, kami ingin menganalisis dinamika negara-negara Asia Timur terhadap Vietnam dan ASEAN dari perspektif kooperatif komparatif yang dibawa oleh liberalisme. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai peran Vietnam di ASEAN, sehingga dapat memajukan diplomasi negara-negara Asia Timur di Asia Tenggara ke tingkat berikutnya.

## DISKUSI

### Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok ke ASEAN

Baik ASEAN maupun Vietnam mempunyai arti penting bagi Jepang. Letak geografisnya yang dekat dengan Jepang dan pertumbuhan ekonominya menjadikan ASEAN sebagai sekutu penting. Namun, pendudukan Jepang di beberapa negara ASEAN selama Perang Dunia II membuat kehadiran Jepang berpotensi menjadi ancaman militer di ASEAN, dan bahkan setelah perang berakhir, sentimen anti-Jepang masih ada di banyak wilayah negara ASEAN. Hubungan Jepang dengan ASEAN kemudian diawali dengan adanya restrukturisasi citra Jepang. Jepang berupaya untuk melupakan masa lalu dan menyambut Jepang yang baru, yaitu negara yang bersedia bekerja sama dengan negara lain. Upaya diplomasi kemudian dilakukan antara Jepang dan negara-negara ASEAN sebagai cara untuk mengubah cara pandang negara-negara ASEAN terhadap Jepang.

Jepang - Hubungan ASEAN semakin kuat terutama di bidang perdagangan dan investasi. ASEAN adalah pemasok bahan mentah yang besar bagi Jepang dan Jepang juga mengimpor komoditas ke negara-negara ASEAN. Data yang dikumpulkan oleh ASEAN - Japan Center menunjukkan bahwa pada tahun 2018, total nilai perdagangan dua arah antara 10 Negara Anggota ASEAN dan Jepang meningkat menjadi lebih dari 25 triliun yen pada tahun 2018, atau mencakup sekitar

15% dari nilai perdagangan Jepang. angka perdagangan secara keseluruhan. Sebaliknya, perdagangan dengan Jepang menyumbang 8% dari total angka perdagangan Negara Anggota ASEAN pada tahun yang sama, yang menjadikan Jepang sebagai mitra dagang ASEAN terbesar kedua setelah Tiongkok, UE, dan Amerika Serikat. Dalam bidang investasi, pada tahun 2018 lebih dari 13.000 perusahaan Jepang beroperasi di kawasan ASEAN. Jepang dan ASEAN memahami pentingnya hubungan mereka, sehingga pertemuan ASEAN +3 telah diadakan sejak tahun 1997.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe, Jepang melihat ASEAN sebagai mitra strategis untuk melawan Tiongkok pengaruhnya yang semakin besar di Indo-Pasifik. Perselisihan mengenai pulau Senkaku/Diaoyu telah memberikan ketegangan pada hubungan kedua negara sehingga Abe mengambil kebijakan aktif untuk menjalin kerja sama keamanan yang lebih erat dengan banyak negara di Asia Tenggara. Meskipun demikian, pengaruh Tiongkok yang semakin besar menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Jepang, sehingga membangun hubungan dengan negara-negara ASEAN terutama di bidang ekonomi untuk memenangkan pengaruh atas Tiongkok.

Sedangkan bagi ASEAN menjalin hubungan dengan Korea Selatan merupakan hal yang berbeda dan Hal yang menarik jika dibandingkan dengan Jepang dan China. Korea Selatan menjadi pilihan alternatif dan cenderung aman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam bermitra dengan negara-negara Asia Timur, di tengah meningkatnya ketegangan Jepang, dalam kepemimpinan ambisius Perdana Menteri Abe untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat secara militer dan mandiri serta Tiongkok di sisi lain, yang memiliki hubungan buruk dengan Laut Cina Selatan (Celik, 2015). 2017). Dengan demikian, situasi ini menguntungkan Korea Selatan dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN.

Korea Selatan juga memainkan peran Middle Power-nya dengan baik dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN. Korea

Selatan memiliki keselarasan identitas dan visi dengan Piagam ASEAN yang tujuan dan prinsip utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, kemajuan sosial, kerjasama melalui bantuan teknis dalam isu lingkungan, kesehatan dan pendidikan serta perdamaian regional (Celik, 2017). Persamaan prinsip inilah yang digunakan Korea Selatan dalam menggunakan kekuatan menengahnya yang diilustrasikan melalui New Southern Policy (NSP) yang digagas Seoul dalam membentuk citranya sebagai tetangga utara yang ramah dalam masalah keamanan (Celik, 2017). Artinya, Korea Selatan selalu mendukung solusi perdamaian dan diplomatik serta menolak konflik dalam masalah keamanan. Korea Selatan juga lebih memilih menjadi penghubung dalam isu-isu ekonomi yang memposisikan diri sebagai mitra setara, dibandingkan menjadi hegemon ekonomi yang bertujuan untuk mengeksploitasi serta menjadi mitra berbagai budaya dan norma, (sekali lagi bukan sebagai hegemon budaya) dalam isu-isu budaya. .

Korea Selatan dan ASEAN juga berpikiran terbuka, mau belajar satu sama lain dan siap bekerja sama secara inklusif, tidak hanya dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memajukan inovasi dan teknologi masa depan menuju perekonomian revolusi industri keempat (Hae-Yong, 2021) . Maka tidak heran, jika hubungan Korea Selatan dengan ASEAN selalu erat dan berkembang setiap tahunnya.

Secara ekonomi, Korea Selatan tampaknya mampu memanfaatkan keunggulan kekuatan menengahnya dengan baik – terutama dalam bermitra dengan ASEAN. Selama 4 dekade terakhir, kemitraan antara ASEAN dan Korea Selatan tumbuh secara konsisten (Celik, 2017). Hingga saat ini, keduanya terus menikmati kemitraan tersebut. Saat ini, ASEAN merupakan mitra dagang dan tujuan investasi terbesar kedua bagi Korea Selatan (Hae-Yong, 2021). Meski dalam kondisi pandemi, kerja sama perdagangan Korea-ASEAN tetap kuat. Faktanya, volume perdagangan yang kacau pada tahun 2020 hanya mengalami penurunan volume perdagangan sebesar 5 persen hingga

mencapai rekor puncak sebesar \$144 miliar (Hae-Yong, 2021). Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Korea Selatan dalam mencapai perjanjian FTA dengan negara-negara anggota ASEAN (Celik, 2017). Keberhasilan Korea Selatan menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia lainnya dalam meningkatkan perekonomian makronya. Keberhasilan Korea Selatan dalam mencapai perjanjian FTA dengan negara-negara anggota ASEAN terletak pada kesamaan gagasan, gagasan dan norma antara Korea Selatan dan negara-negara anggota ASEAN. Hal inilah yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan pengertian di antara keduanya. Selain itu, Korea Selatan sendiri diketahui tidak memiliki permasalahan terkait wilayah atau etnis minoritas dengan negara – anggota ASEAN mana pun (Celik, 2017).

Lebih lanjut, hubungan Tiongkok dengan ASEAN sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum hadirnya sistem negara-bangsa yang kita kenal sekarang. Pada era kesultanan, Tiongkok telah menjadi aktor utama yang sangat berpengaruh hampir di seluruh Asia – khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur melalui sistem upeti yang banyak dilakukan oleh para pekerja di Asia Tenggara (kecuali Vietnam) – dikenal juga dengan istilah barbar, ke pelayanan Tiongkok secara berkala selama bertahun-tahun (Kim, 2008). Dinasti Tiongkok juga memberikan hak istimewa perdagangan kepada mereka yang telah memberikan anak sungainya dan bersedia mengakui keberadaan Tiongkok sebagai penguasa atas wilayahnya sebagai legitimasi dominasinya di Asia Tenggara. Setelah masa kerukunan berlalu dan berganti menjadi negara Republik Rakyat Tiongkok. Negara yang saat ini mengklaim dirinya menganut paham sosialis modern, kini telah menjelma menjadi negara adidaya di bidang ekonomi dan perdagangan, bahkan menjadi rival AS dalam menjadi mitra strategis bagi banyak negara di dunia, salah satunya adalah ASEAN.

Sejak reformasi ekonomi pada tahun 1980an, Tiongkok perlahan-lahan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi

baru bagi negara-negara tetangganya, termasuk ASEAN. Kesuksesan China sebagai hegemon di masa lalu, seolah ingin terulang di masa kini. Saat ini Tiongkok lebih memilih melakukan pendekatan regionalisme yang tenang melalui narasi 'kebangkitan secara damai'. Prinsip 'kebangkitan damai' yang diklaim pemerintah Tiongkok bertujuan untuk menciptakan kawasan yang harmonis, damai, dan stabil. Narasi yang digaungkan Tiongkok setidaknya 2 dekade lalu, sebenarnya sudah tercermin dalam langkah-langkah Tiongkok selama menjalin hubungan dengan ASEAN seperti memutuskan untuk tidak mendevalusi mata uang internasionalnya, renminbi (RMB) pada saat krisis moneter tahun 1997, dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara ASEAN yang paling terkena krisis seperti Thailand dan Indonesia baik melalui kerangka IMF atau kerja sama bilateral (Chatterji, 1997). Selain itu, upaya Tiongkok dalam meningkatkan pengaruhnya di ASEAN juga terlibat aktif dalam berbagai lembaga kerja sama ASEAN antara lain, ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three dan East Asian Summit (Chatterji, 2021). Bahkan, di saat Covid-19 sudah menjadi pandemi, Tiongkok menjadi salah satu negara pertama yang berkomitmen untuk terus memberikan bantuan vaksin kepada negara-negara ASEAN hingga pandemi berakhir (Anggoro, 2021).

Strategi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan ASEAN tidak hanya melibatkan diri dalam kerja sama antar-ASEAN, tetapi juga mengajak negara-negara ASEAN untuk terlibat dalam kerja sama internasional Tiongkok yang diklaim oleh Beijing sebagai kemitraan yang saling menguntungkan dengan tujuan membangun komunitas yang mempunyai tujuan bersama. seperti; mega proyek ambisiusnya, Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Dalam proyek BRI misalnya, Tiongkok menawarkan kerja sama strategis kepada negara-negara anggota ASEAN seperti pembangunan infrastruktur dan perdagangan, serta investasi industri, yang keduanya menjadi prioritas negara-negara anggota ASEAN dalam mengurangi

kesenjangan ekonomi yang tidak seimbang. Sedangkan bagi Tiongkok, Proyek BRI merupakan salah satu jalan keluar Tiongkok dalam mengatasi permasalahan perekonomian dalam negerinya, yaitu kelebihan kapasitas industri padat karya seperti baja dan semen dll serta cadangan devisa yang berlebihan sehingga menyebabkan ketimpangan perekonomian di masa depan (Wang, 2016). Oleh karena itu, BRI diprakarsai oleh Tiongkok dengan tujuan untuk memberikan industri padat karya kepada negara-negara berkembang di Asia melalui kerangka kerja sama ekonomi internasional yang komprehensif sehingga industri dalam negeri Tiongkok dapat fokus pada industri lain yang lebih canggih dan menjanjikan bagi kepentingan nasional Tiongkok di masa depan (Wang, 2016).

Di bidang ekonomi, kerja sama ekonomi dalam lingkup regional dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) juga menjadi nilai tawar Tiongkok melalui kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan negara sekitarnya. Bagi Tiongkok, bergabung dengan kerja sama multilateral seperti RCEP akan mempermudah pengurangan kapasitas industri padat karya dan kelebihan devisa Tiongkok sendiri ke perekonomian regional melalui pengurangan hambatan tarif dan nol tarif (Dong, 2020). RCEP juga memperkuat sinkronisasi rantai pasok dari Tiongkok ke negara-negara ASEAN atau sebaliknya, sehingga RCEP secara implisit telah menjadi bagian dari strategi multilateralisme baru Tiongkok dalam melawan dominasi ekonomi regional AS di kawasan Asia Tenggara (Dong, 2020). Namun, di balik kerja sama Tiongkok dengan negara-negara anggota ASEAN, seluruh tindakan dan agenda regional yang proaktif dan penting juga merupakan rencana nasional Tiongkok untuk memenuhi kepentingan dan tujuan nasionalnya. Padahal dari pernyataan resmi pemerintah Tiongkok, inti dari strategi regionalismenya adalah mengedepankan “pengamanan lingkungan yang damai baik di tingkat regional maupun global sehingga setelah itu Tiongkok dapat fokus pada pembangunan ekonominya, bahkan sejak

tahun 1990an, Tiongkok sendiri telah berupaya mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara dengan dirinya sebagai pusatnya (Chatterji, 2021), sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara ASEAN, Tiongkok akan menjadi hegemoni baru yang membuat ketergantungan ekonomi dikhawatirkan akan berdampak pada keamanan kawasan.

Pada saat yang sama, hubungan Tiongkok-ASEAN juga tidak mengalami titik krisis akibat sengketa Laut Cina Selatan yang pada dasarnya merupakan konflik antara Tiongkok dan beberapa negara pengklaim ASEAN. Baik Tiongkok maupun ASEAN tidak pernah mengutamakan konflik dan konfrontasi dalam hubungan, namun dalam persoalan Laut Cina Selatan berbeda, ketidakpercayaan antara keduanya mulai tumbuh dan saling curiga (Haitao, 2017). Bagi Tiongkok, tindakan mengklaim Laut Cina Selatan secara keseluruhan diperlukan untuk eksplorasi energi yang kini sangat diperlukan untuk mendukung industri manufakturnya. Di sisi lain, penguatan militer juga dilakukan untuk memperkuat dominasi Tiongkok di bidang keamanan (Hong, 2013).

Karena itu, Hubungan bilateral antara Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dengan Vietnam menjadi bagian penting dalam pengembangan rantai pasok ketiga negara tersebut. Bagi Korea Selatan dan Tiongkok, Vietnam memainkan peran penting dalam industri manufakturnya. Namun di sisi lain, Jepang yang juga berperan sebagai sekutu AS mempunyai niat berbeda, yakni menyeimbangkan dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Korea Selatan memang pertama kali melihat Vietnam sebagai mitra strategi dagang sehingga hingga saat ini, Vietnam menjadi salah satu negara yang mendapatkan bantuan keuangan dan porsi perdagangan terbesar dengan Korea Selatan. Namun bagi Tiongkok, Vietnam merupakan bagian yang harus didapatkan untuk melengkapi dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Meski bertetangga dan tinggal bersebelahan, Vietnam sendiri masih mencurigai motif China, khususnya dalam isu Laut China Selatan.

**Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menuju Vietnam**



Jepang dan Vietnam sudah menjalin hubungan pada tahun 1973. Baik Jepang maupun Vietnam mempunyai kemitraan strategis dalam hubungan ekonomi-keamanan, khususnya pada pemerintahan yang dipimpin Abe. Pertama, pemerintahan Abe menandatangani perjanjian kemitraan strategis Jepang-Vietnam pada periode 2006-2007, yang merupakan tugas pertama Abe dalam pemerintahan Jepang (Phan, 2020). Kemitraan strategis pertama berisi topik utama tentang kemitraan keamanan bersama di Asia Tenggara melalui peningkatan kapasitas dan memajukan kemakmuran ekonomi dan konektivitas melalui infrastruktur. Sama seperti kebanyakan hubungan bilateral di negara lain, baik Jepang maupun Vietnam juga fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk lebih mendukung kehidupan masyarakat di kedua negara. Apalagi Jepang dan Vietnam merupakan dua negara Asia yang memiliki pemahaman yang sama mengenai kerja sama ekonomi.

Selama masa jabatan Abe sebagai Perdana Menteri, ia sangat bersemangat dan antusias dalam mendukung segala bentuk kebijakan Hanoi yang mengutamakan keamanan regional dan internasional. Dalam pandangan Abe, Jepang dan Vietnam hanya dipisahkan oleh letak geografis namun keduanya terhubung oleh lautan dan samudera yang luas, sehingga kedua negara harus saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan regional dengan aturan yang berdasarkan hukum internasional. Terlebih lagi, hubungan Vietnam-Jepang saat ini sedang berkembang di saat pengaruh Tiongkok semakin berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini kemudian mendorong Jepang di bawah pemerintahan Abe berjanji mendukung Vietnam untuk menolak klaim Tiongkok di kawasan tersebut dengan memberikan bantuan berupa enam kapal patroli baru dari Jepang yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian senilai US\$ 345 juta untuk membangun enam kapal patroli tersebut.

Secara keseluruhan, hubungan bilateral Jepang dan Vietnam pada masa pemerintahan Abe sejauh ini berjalan baik. Kedua belah pihak memahami pentingnya kolaborasi dan diplomasi dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan perselisihan negara baik di bidang ekonomi maupun keamanan. Hal ini terlihat dari terciptanya perjanjian strategis antara Jepang dan Vietnam untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya dan juga keduanya mempunyai etika yang baik untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan menggunakan koridor hukum internasional.

Hubungan Korea Selatan dan Vietnam resmi terjalin pada tahun 1972. Keduanya memiliki kesamaan sejarah dan budaya. Pasca perang dingin, kedua belah pihak telah menjalin persahabatan yang saling menguntungkan di berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya serta pendidikan dan pelatihan (Kien, et al., 2010). Dari sektor perdagangan dalam hubungan bilateral, Korea Selatan dan Vietnam mengalami peningkatan baik volume maupun variasi produk, hal ini berkat perkembangan dan penguatan infrastruktur yang pesat baik dari segi kelembagaan maupun fisik (Kien, et al., 2010). Vietnam juga dikenal sebagai penerima ODA Korea terbesar, yaitu 44 persen dari rata-rata ODA Korea di ASEAN selama satu dekade terakhir (Vu, 2021). Sejak dimulainya kemitraan dagang Korea-Vietnam pada tahun 1990an, perdagangan antara Korea Selatan dan Vietnam telah meroket hampir 20 kali lipat. Vietnam kini menjadi mitra dagang terbesar ke-4 bagi Korea Selatan setelah Tiongkok, Amerika, dan Jepang (Vu, 2021).

Sejak diluncurkannya kerangka kerja sama NSP, Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mendapat perhatian besar dari Blue House. Sama seperti Korea Selatan-ASEAN, hubungan Korea-Vietnam mengedepankan kerja sama ekonomi sebagai landasan hubungan bilateral keduanya. Korea Selatan menyadari bahwa Vietnam merupakan negara yang memainkan peran penting bagi industri manufakturnya seperti Samsung

Electronics, POSCO, dll (Vu, 2021). Selain mitra strategis di bidang ekonomi, Vietnam yang masih menjalin persahabatan erat dengan Korea Utara sebagai bekas sekutu perang dingin dan kawan sosialis, kini menjadi mediator atau pihak ketiga dalam konflik di semenanjung Korea (Park, 2012). Vietnam yang memiliki pengalaman serupa telah menjadi konsultan dan contoh jika hanya Korea Selatan dan Utara yang mau membuka opsi reunifikasi. Besarnya bantuan ekonomi dan kerja sama perdagangan yang dilakukan Korea-Vietnam, nampaknya sesuai dengan kontribusi berharga Vietnam dalam mengantisipasi perdamaian dan keamanan di Korea (Park, 2012).

China dan Vietnam punya keunikan masing-masing. Di satu sisi, Vietnam merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang hidup berdampingan dengan Tiongkok selama lebih dari seribu tahun, hampir menciptakan perdamaian dalam beberapa insiden perang (Thuy, 2016). Namun di sisi lain, kebangkitan Tiongkok menimbulkan tantangan baru bagi Vietnam. Kenangan perang Sino-Vietnam pada tahun 1979 yang juga diikuti dengan permusuhan terhadap Tiongkok selama 10 tahun dan isolasi internasional memberikan pengalaman dalam membuat para pengambil kebijakan Vietnam merancang kebijakan luar negeri Vietnam dengan hati-hati (Kamis, 2016). Oleh karena itu, dalam menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok, Vietnam nampaknya mempunyai dua kebijakan yang berbeda, yaitu kerja sama dan perjuangan dalam mencapai hubungan damai. Begitu pula dengan Tiongkok, pada kepemimpinan Xi, prinsip diplomasi Tiongkok cenderung proaktif. Bagi Tiongkok sendiri, Vietnam merupakan salah satu negara yang penting untuk melengkapi pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal pekerjaan misalnya, Tiongkok-Vietnam memiliki sejumlah kepentingan yang konvergen dalam mendorong kerja sama ekonomi, sekaligus berbagi pengalaman reformasi dan monopoli kekuasaan partai komunis (Thuy, 2016). Vietnam adalah salah satu anggota pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang diprakarsai oleh Tiongkok (Kamis, 2016).

Namun dari aspek perjuangan, baik Tiongkok maupun Vietnam mempunyai permasalahan yang paling pelik yaitu sengketa Laut Cina Selatan yang keduanya saling mengklaim wilayah maritim masing-masing khususnya di kepulauan Paracel dan Sparty (Tien, dkk., 2021). Selain itu, Tiongkok juga kesulitan menempatkan pengaruhnya di Vietnam karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam isu pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air di hulu Sungai Mekong di Tiongkok (Thuy, 2016).

Secara keseluruhan, hubungan Tiongkok-Vietnam tidak dapat dipisahkan dari kerja sama dan tantangan. Vietnam sendiri tidak bisa mengelak bahwa ia mempunyai kesamaan sejarah, tradisi dan budaya dengan Tiongkok selain itu, Tiongkok sendiri juga masih membutuhkan Vietnam dalam menempatkan industri manufakturnya. Namun di sisi lain, hubungan Sino-Vietnam juga mengalami sejumlah pertikaian seperti masalah Laut Cina Selatan dan pembangunan bendungan di hulu Sungai Mekong.

Oleh karena itu, hubungan bilateral Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dengan Vietnam menjadi bagian penting dalam pengembangan rantai pasok ketiga negara tersebut. Bagi Korea Selatan dan Tiongkok, Vietnam memainkan peran penting dalam industri manufakturnya. Namun di sisi lain, Jepang yang juga berperan sebagai sekutu AS mempunyai niat berbeda, yakni menyeimbangkan dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Korea Selatan memang pertama kali melihat Vietnam sebagai mitra strategi dagang sehingga hingga saat ini, Vietnam menjadi salah satu negara yang mendapatkan bantuan keuangan dan porsi perdagangan terbesar dengan Korea Selatan. Namun bagi Tiongkok, Vietnam merupakan bagian yang harus didapatkan untuk melengkapi dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Meski bertetangga dan tinggal bersebelahan, Vietnam sendiri masih mencurigai motif China, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan.

Hubungan diplomatik Jepang dengan Vietnam berawal dari berkembangnya pengaruh komunis di Vietnam. Pada tanggal

14 April 1973, Pemerintah Jepang mengirimkan spesialis senior Kementerian Luar Negeri mengenai Vietnam Utara ke Hanoi dalam sebuah langkah besar menuju pembentukan hubungan diplomatik antara Tokyo dan Hanoi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dan memberikan bantuan keuangan kepada Vietnam. Hal ini kemudian berujung pada pengakuan Vietnam sebagai negara komunis oleh pemerintah Jepang.

Hubungan diplomatik antara Tokyo dan Hanoi semakin berkembang, khususnya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Ketika Perdana Menteri Abe kembali menjabat pada tahun 2013, ia setuju untuk memperluas kemitraan dengan Vietnam lebih dari sekadar hubungan ekonomi dan mencakup sektor keamanan. Menurunnya peran AS di kawasan dan meningkatnya minat Tiongkok, yang menyebabkan tumpang tindih klaim dengan Vietnam, menjadikan kemitraan strategis sebagai bagian penting dalam diplomasi antara Jepang dan Vietnam. Kerja sama tersebut meliputi kemajuan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, dan kunjungan kapal militer.

Namun hubungan terkuat mereka masih dalam bidang kerja sama ekonomi. Kedua negara telah menjalin kerja sama ekonomi yang kuat, termasuk aliran ODA ke Vietnam dari Jepang.

Mereka juga merupakan anggota Kemitraan Trans-Pasifik, sebuah kawasan perdagangan bebas yang ditandatangani pada bulan Februari 2016. Di negara bagian Pada tingkat ini, keduanya telah membuat banyak perjanjian bilateral untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi mereka. Vietnam memandang Jepang sebagai sumber pendanaan, teknologi, inovasi dan keamanan yang dapat diandalkan. Dana dan investasi ODA Jepang telah memainkan peran penting dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Vietnam. (Trung, Nguyen T.2015). Sejak terjalannya hubungan diplomatik antara Jepang dan Vietnam, kita telah melihat hubungan yang stabil dan kooperatif. Kedua negara telah

membuktikan satu sama lain bahwa mereka dapat diandalkan, sehingga menghasilkan hubungan diplomatik yang relatif bersahabat, tidak seperti hubungan dengan AS yang terhenti di bawah pemerintahan Presiden Trump.

Seoul dan Hanoi secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1992. Setelah empat kali normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1992, Korea Selatan segera menjalin kemitraan dagang senilai \$1,3 miliar dengan Vietnam, menjadikan Hanoi sebagai mitra dagang terbesar ketiga Seoul (Balfour, 1996). Pada tahun 2009, Hanoi dan Seoul meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi "Strategi Kemitraan Kooperatif". Hubungan bilateral antara Hanoi dan Seoul juga tumbuh di bawah Presiden Moon Jae-in melalui NSP yang diprakarsai oleh Presiden Moon.

Seoul dan Hanoi sudah memiliki banyak kemitraan ekonomi yang menciptakan saling ketergantungan. Pada tahun 2021, akan terdapat lebih dari 7.000 perusahaan Korea yang beroperasi di Vietnam, sehingga tidak heran jika Vietnam sendiri disebut sebagai "Pilar Ekonomi Kebijakan Baru Korea ke Selatan" (Vu, 2021). Hanoi juga merupakan salah satu Penerima ODA Korea Selatan terbesar di ASEAN satu dekade lalu (Vu, 2021). Sama seperti negara-negara Asia Timur lainnya, Seoul lebih banyak berpartisipasi dalam kerja sama ekonomi baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Di tingkat multilateral, Seoul dan Hanoi diketahui berpartisipasi dalam APEC, ASEAN Plus Three, dan RCEP. Hanoi juga memandang Seoul sebagai negara yang sukses dalam industri berat dan teknologi tinggi yang disebabkan oleh investasi awal pemerintah Korea di bidang tersebut pada awal pembangunan ekonominya pada tahun 1960an. Berbeda dengan Beijing dan Tokyo yang masih memperlakukan masalah keamanan dengan Hanoi, Seoul lebih memilih fokus pada kerja sama ekonomi penuh dan menghindari keterlibatan militer dan politik dengan Vietnam. Sejak terjalannya hubungan diplomatik pada tahun 1990an, nampaknya

hubungan Hanoi-Seoul semakin membaik dan menguntungkan jika dilihat dari segi perekonomian.

Hubungan diplomatik Beijing dan Hanoi sudah terjalin lama bahkan sebelum adanya sistem negara bangsa yang kita kenal sekarang. Pada saat Perang Vietnam, misalnya, Tiongkok telah terlibat aktif dalam mendukung Vietnam Utara dengan memasok senjata dan mengirimkan lebih dari 30.000 tentara untuk menyerang Vietnam Selatan yang didukung AS (Washington Post, 1989). Setelah melewati masa kelam pada awal tahun 1970an hingga 1980an akibat Perang Sino-Vietnam, Tiongkok-Vietnam melakukan normalisasi hubungan bilateral secara diplomatis dengan menandatangani perjanjian Pedoman Dunia ke-16 yang dihadiri oleh Le Kha Phieu, Sekretaris Jenderal CPV dan Jiang Zemin, Sekretaris Jenderal dari PKC.

Hingga saat ini, hubungan diplomatik antara Beijing dan Hanoi pada masa presiden XI nampaknya memasuki babak baru. Meskipun dunia kini memasuki masa Pandemi Covid-19, namun hubungan Vietnam-Tiongkok nampaknya tetap berjalan erat dan hangat. Terkait masalah pandemi, Beijing pertama kali menawarkan kerja sama dengan Hanoi dalam pengembangan produksi vaksin dan bidang kesehatan masyarakat lainnya. Selain itu, Beijing juga mendukung Hanoi melalui pengembangan BRI yang mendorong keterbukaan perdagangan dan mengembangkan konektivitas infrastruktur di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya (MOFCOM, 2021). Selain itu, keikutsertaan Hanoi sebagai salah satu pendiri AIIB yang mendanai proyek BRI oleh Tiongkok serta ikut serta dalam kerangka RCEP juga semakin memperkuat hubungan erat Beijing-Hanoi.

Meskipun pada masa kepemimpinan XI, Tiongkok dan Vietnam telah mengalami penguatan kerja sama ekonomi, namun baik Beijing maupun Vietnam tidak menghadapi tantangan khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Meski Beijing, Hanoi, dan ASEAN saat ini sedang merumuskan Code of Conduct (COC) dalam menjaga kawasan, namun seringkali kedatangan kapal perang Tiongkok dan latihan militer di dekat

perbatasan Vietnam membuat Hanoi curiga terhadap Beijing.

Hubungan Tokyo/Seoul/Beijing dengan Hanoi memiliki kesamaan, yaitu sama-sama fokus pada kemitraan ekonomi dan memperkuat perdagangan di Asia Tenggara. Ketiganya memiliki perjanjian dan perjanjian ekonomi yang berbeda-beda, seperti Tokyo melalui Trans-Pacific Partnership, Beijing melalui BRI, dan Seoul melalui NSP. Meski ketiganya memiliki proyek kemitraan ekonomi regional masing-masing, Hanoi tampaknya mampu memenuhi itu semua. Hal ini tidak terlepas dari iklim industri dan perekonomian domestik Vietnam yang baik, yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan upah tenaga kerja yang rendah. Namun nampaknya hanya Seoul yang mengutamakan diplomasi ekonomi dalam menjalin hubungan dengan Hanoi. Tokyo dan Beijing juga tetap menjadi mitra strategis Hanoi, meski keduanya tetap mengharapkan kerja sama strategis dan keamanan militer, apalagi Beijing yang masih berjuang untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Hanoi.

## KESIMPULAN

Kesamaan dalam budaya dan tradisi telah membentuk landasan hubungan Vietnam dan Asia Timur, mempengaruhi politik, budaya, pendidikan, dan bidang lain di kedua negara. Dilihat dari besarnya investasi yang dilakukan, Korea telah mengangkat Vietnam menjadi salah satu mitra dagang utamanya berkat perekonomiannya yang maju dan komitmennya terhadap energi terbarukan. Korea dan Vietnam bekerja sama secara umum secara damai. Hubungan Vietnam dengan Jepang tidak stabil. Interaksi mereka terhambat oleh keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia II. Namun, hubungan Jepang dan Vietnam semakin menguat sebagai dampak dari menurunnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan dan kesediaan pemerintah PM Shinzo Abe untuk berinvestasi di Vietnam dan menyediakan kapal patroli dalam masalah Laut Cina Selatan.

Vietnam dan Tiongkok mempunyai hubungan yang berbeda dengan negara lain. Dekatnya perbatasan antara Tiongkok dan

Vietnam dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Kesenjangan antara keduanya semakin besar meskipun mereka memiliki hubungan yang kuat akibat sengketa Laut Cina Selatan. Vietnam lebih banyak bergerak ke arah mitra-mitra lain, seperti Amerika Serikat, sebagai akibat dari hal tersebut dan keengganan Tiongkok untuk berinvestasi di Vietnam.

Kita dapat menyimpulkan bahwa keinginan suatu negara untuk melakukan investasi dan meningkatkan hubungan dengan negara lain melalui kolaborasi akan berkontribusi terhadap terpeliharanya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tindakan Jepang dan Korea menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut dapat berkontribusi terhadap kelanjutan perdamaian di kawasan. Di sisi lain, Tiongkok perlu melakukan pendekatan hubungan diplomatik dengan lebih cerdas. Selain meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan, stabilitas ASEAN bergantung pada penguatan hubungan ekonomi dan interpersonal dengan Vietnam.

## REFERENSI

### Buku

D.Prakash, & A.Klotz. (2008). Metode Kualitatif Dalam Hubungan Internasional: Panduan Pluralis. Hampshire: Palgrave Macmillan.

### Jurnal

Cotillon, H. (2017). Sengketa Wilayah dan Nasionalisme: Studi Kasus Perbandingan Tiongkok dan Vietnam. *Jurnal Urusan Asia Tenggara Saat Ini*, hal.51-88.

Fook, Lye Liang & Ha Hoang Hop. (2019). Hubungan Vietnam-Korea Utara: Masih Merupakan Hubungan Istimewa? PENELITI DI ISEAS – YUSOF ISHAK INSTITUTE ANALISIS KEJADIAN TERKINI No.18, hal.1-10.

Haitao, H., 2017. Peran Kepercayaan dalam Hubungan Tiongkok-ASEAN –

Menuju Pembangunan Kepercayaan Multi-level untuk Tiongkok dan ASEAN. *Jurnal Internasional Studi Tiongkok*, 8(1), hal.45-59.

Han, X. (2016). *Seberapa Istimewanya Hubungan Istimewa antara Tiongkok dan Vietnam? Kajian Ulang terhadap Tiga Aspek Hubungan Sino-Vietnam: Model Tiongkok, Tatanan Dunia Tiongkok, dan Manajemen Konflik*. Studi Asia Tenggara di Universitas Freiburg (Jerman), hal.1-24.

Hirata, K. (1998). *Jepang sebagai Negara Reaktif : Menganalisis Kasus Hubungan Jepang-Vietnam*, Kajian Jepang, vol. 18, tidak. 2 hal.1-33.<http://www.csun.edu/~kh246690/active.pdf>

Hiswi, PA (2020). Peningkatan Kemampuan Militer Vietnam dalam Sengketa Laut Cina Selatan: Perlombaan Senjata atau Status Quo? *Strategi Global*, 14, hal.1.

Hong, Z., 2013. Sengketa Laut Cina Selatan dan Hubungan Tiongkok - ASEAN. *Urusan Asia*, 44(1), hal.27-43.

Izumikawa, Y. (2010). Menjelaskan Antimilitarisme Jepang: Kendala Normatif dan Realis terhadap Kebijakan Keamanan Jepang. *Keamanan Internasional*, 35(2), hlm.123–160.<http://www.jstor.org/stable/40981245>

INVESTASI JEPANG DI ASIA TENGGARA. Dalam INVESTASI INFRASTRUKTUR JEPANG DI ASIA TENGGARA hal. 10–14. Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam.<http://www.jstor.org/stable/resrep20020.7>

KIM, H.-S. (2018). Penggerak Politik Bantuan Pembangunan Resmi Korea Selatan ke Myanmar. *Asia Tenggara Kontemporer*, 40(3), hlm.475–502. <https://www.jstor.org/stable/26545304>

Kikuchi, T., & Unzaki, S. (2019). Koga, K. (2016). “KOORDINASI STRATEGIS” JEPANG TAHUN 2015: ASEAN, Asia Tenggara, dan Agenda

- Diplomatik Abe. Urusan Asia Tenggara, hal.67–80. <https://www.jstor.org/stable/26466919>
- Ravindran, MS (2012). Potensi Pemaksaan Ekonomi Tiongkok dalam Sengketa Laut Cina Selatan: Studi Banding Filipina dan Vietnam. *Jurnal Urusan Asia Tenggara Saat Ini*, hal.105-132.
- Sudo, S. (1988). Hubungan Jepang-ASEAN: Dimensi Baru dalam Kebijakan Luar Negeri Jepang. *Survei Asia*, 28(5), hal.509–525. <https://doi.org/10.2307/2644640>
- Tien, NH, & Anh, DD (2019). Hubungan persahabatan dan kemitraan antara Vietnam dan Korea Selatan mengenai sifat, perkembangan saat ini dan prospek masa depan. *Jurnal Internasional Penelitian Keuangan dan Manajemen* 2019, 2(1).
- Trang, BT (2014). Persamaan Vietnam dan Korea Selatan – terkait dengan kemitraan strategi kerja sama dan arah masa depannya. *Jurnal Sosial Internasional*, hal.88-92.
- Wang, Y., 2016. Ofensif untuk defensif: inisiatif sabuk dan jalan dan strategi besar baru Tiongkok. *Tinjauan Pasifik*, 29(3), hal.1-9.
- Artikel Daring**
- Anggoro, WD, 2021. Tiongkok Akan Memberikan Dukungan Vaksin ke Negara-negara ASEAN hingga Pandemi Terkalahkan. Tersedia di: <https://www.medcom.id/english/world/3NO9QA3k-china-to-provide-vaccine-support-to-asean-countries-until-pandemic-defeated> (diakses: 10 Januari 2022).
- Anh, Nguyen Thi Lan. (2015). Prospek Kerja Sama Maritim di Asia Timur. Tersedia di :<http://www.jstor.com/stable/resrep14743> (diakses: 10 Januari 2022).
- Atsusuke Kawada. (2020). Pemerintahan baru Jepang kemungkinan tidak akan melanjutkan kebijakan diplomatik Abe untuk Vietnam: ekonom JETRO. Tersedia di:<https://en.vietnamplus.vn/new-japanese-govt-likely-to-continue-abes-diplomatic-policy-for-vietnam-jetro-economist/182528.vnp> (diakses: 10 Januari 2022).
- Balfour, F., 1996. Vietnam Pilihan Strategis. Tersedia di:<https://web.archive.org/web/20070614012334/http://www.iht.com/articles/1996/09/16/viet.t.0.php> (diakses: 10 Januari 2022).
- Bellacqua, J. (2012). Faktor Tiongkok dalam Hubungan AS-Vietnam. *Studi CNA China*, 42. Tersedia [https://www.cna.org/cna\\_files/pdf/DRM-2012-U-000184-FINAL.pdf](https://www.cna.org/cna_files/pdf/DRM-2012-U-000184-FINAL.pdf) (diakses: 10 Januari 2022).
- Bloomberg. (2017). Abe menjanjikan bantuan baru terkait keamanan kepada Vietnam. Tersedia di:<https://www.japantimes.co.jp/news/2017/01/16/national/politics-diplomacy/abe-jokowi-unite-south-china-sea-disputes-plan-two-plus-two-meeting/>(diakses: 10 Januari 2022).
- Catharin Dalphino. (2015). Abe Membuka Front Baru. *Koneksi Komparatif*. Tersedia di :<http://cc.pacforum.org/2015/05/abe-opens-new-fronts/>(diakses: 10 Januari 2022).
- Celik, H., 2017. Korea Selatan Sebagai Kekuatan Tengah: Studi Kasus Hubungan Korea Selatan-ASEAN. Tesis PhD, Universitas Teknik Timur Tengah, Ankara. <https://etd.lib.metu.edu.tr/uplod/12621461/index.pdf> (diakses: 10 Januari 2022).
- Chatterji, R., 2021. Hubungan Tiongkok dengan ASEAN: Sebuah Penjelasan. Tersedia di:<https://www.orfonline.org/research/china-relationship-asean-explainer/>(diakses: 10 Januari 2022).
- CSIS. (2016). Asia Tenggara Mengikuti Irama Doktrin Abe Jepang. Tersedia di:<https://www.csis.org/analysis/southeast-asia-dances-tune->

- [japan%E2%80%99s-abe-doctrine](#)  
(diakses: 10 Januari 2022).
- Dennis, David. (2020). Perdana Menteri Jepang akan mengunjungi Hanoi. Tersedia di: <https://www.foreignbrief.com/daily-news/japanese-prime-minister-to-visit-hanoi/> (diakses: 10 Januari 2022).
- Lakukan, Kam Thi. "Menemukan Kemitraan Strategis Vietnam-Jepang DALAM Lanskap Politik Asia Timur yang Berubah". Tersedia di: <http://nghiencuuquote.org/2014/07/16/vietnam-japan-strategic-partnership/>(diakses: 10 Januari 2022).
- Dong, J., (2020). Apa Implikasi RCEP terhadap Perekonomian Tiongkok dan Regional. Tersedia di: <https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/china-what-is-the-implication-of-rcep-to-chinese-and-regional-economy/>(diakses: 10 Januari 2022).
- Hae-Yong, K., 2021. Meninjau kembali hubungan ASEAN-Korea pada Hari ASEAN ke-54. Tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/08/04/revisiting-asean-korea-relations-on-the-54th-asean-day.html> (diakses: 10 Januari 2022).
- Hanh Nguyen. (2020). Pasca Abe, Hubungan Vietnam-Jepang Tidak Ada Tujuan Selain Meningkatkan. Tersedia di: <https://thediplomat.com/2020/09/post-abe-vietnam-japan-relations-have-nowhere-to-go-but-up/> (diakses: 10 Januari 2022).
- Hiep, LH (2017). Tarik dan Dorong: Hubungan Sino-Vietnam dan Kunjungan Presiden Xi ke Hanoi. Tersedia di: [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2017\\_92.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_92.pdf) (diakses: 10 Januari 2022).
- Hei, Le Hong. (2012). Lintasan strategis Vietnam Dari pembangunan internal hingga keterlibatan eksternal. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/resrep04019> (diakses: 10 Januari 2022).
- Hiep, L. (2017). Vietnam. Politik di Vietnam kontemporer: Hubungan partai, negara, dan otoritas Dedit oleh Jonathan D. London Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014. Hal. 230. Catatan, Daftar Pustaka, Indeks. Jurnal Studi Asia Tenggara, 48(1), 169-172. doi:10.1017/S0022463416000667
- Hung, Nguyen Manh. (2018). Vietnam Pada Tahun 2017: Konsolidasi Kekuatan, Reformasi Domestik, dan Mengatasi Tantangan Geopolitik Baru. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26492789>(diakses: 10 Januari 2022).
- Karl Sorri. (2013). Jepang dan Vietnam memperkuat hubungan. Wawasan Risiko Global. Tersedia di: <https://globalriskinsights.com/2013/08/japan-and-vietnam-strengthen-ties/> (diakses: 10 Januari 2022).
- Linh Pham. (2020). Vietnam berharap dapat meningkatkan hubungan dengan Jepang setelah pengunduran diri Abe. Waktu Hanoi. Tersedia di: <http://hanoitimes.vn/vietnam-expects-to-lift-up-ties-with-japan-after-abes-resignation-314240.html> (diakses: 10 Januari 2022).
- Park, Joon Woo. (2012). Korea dan Vietnam: Hubungan Bilateral. Tersedia di: <https://aparc.fsi.stanford.edu/korea/multimedia/korea-and-vietnam-bilateral-relationship-0>(diakses: 10 Januari 2022).
- Pham, QH (2020). Rivalitas Regional di Indo-Pasifik: Peran Vietnam sebagai Ketua ASEAN Tahun 2020. Pusat Timur-Barat. Tersedia di: <http://www.jstor.org/stable/resrep25005> (diakses: 10 Januari 2022).
- Phan, Thanh Hoan dan Jeong, Ji Young. (2012). Tersedia di: Analisis Hubungan Perdagangan Bilateral Korea-Vietnam. Makalah MPRA No.48312(diakses: 10 Januari 2022).
- Phan, XDR, (2020). Bagaimana aktivisme diplomatik Abe meningkatkan hubungan Vietnam-Jepang. Tersedia di: <https://www.eastasiaforum.org/202>



- [0/09/26/how-abes-diplomatic-activism-elevated-vietnam-japan-ties/](http://0/09/26/how-abes-diplomatic-activism-elevated-vietnam-japan-ties/) (diakses: 10 Januari 2022).
- Phuong Pham. (2020). Vietnam dan Jepang akan mempertahankan hubungan strategis setelah Abe. Tersedia di: <https://asiatimes.com/2020/09/vietnam-japan-to-maintain-strategic-ties-after-abe/>. (diakses: 10 Januari 2022).
- Reuters. (2013). Abe dari Jepang Beralih ke Asia Tenggara untuk Melawan Tiongkok. Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-japan-abe-asean-idUSBRE90FOLW20130116> (diakses: 10 Januari 2022).
- Shoji, Tomotaka. (2015). Kerja Sama Keamanan Jepang dengan ASEAN: Mengejar Status sebagai Mitra yang “Relevan”. Tersedia di: [http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2015/bulletin\\_e2015\\_5.pdf](http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2015/bulletin_e2015_5.pdf) (diakses: 10 Januari 2022).
- Springer, Kyle dkk. (2020). *Keterlibatan Korea Selatan dengan kawasan Indo-Pasifik: perspektif Vietnam*. Tersedia di: <https://perthusasia.edu.au/our-work/embracing-the-indo-pacific-south-korea%E2%80%99s-progress> (diakses: 10 Januari 2022).
- Teppe, Kasai. (2019). Jepang harus mendukung aktivis hak asasi manusia Vietnam. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/1/27/japan-must-stand-with-vietnamese-human-rights-activists/>. (diakses: 10 Januari 2022).
- Thayer, CA (2018). MODERNISASI KEKUATAN: Vietnam. *Urusan Asia Tenggara*, 429–444. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/26492790> (diakses: 10 Januari 2022).
- Van, Le Thuy Ngoc. (2013). Hubungan Dagang Vietnam-Jepang pada Dekade Pertama Abad ke-21. Tersedia di: <https://researcharchive.vuw.ac.nz/xmliui/handle/10063/3273> (diakses: 10 Januari 2022).
- Vu, M., 2021. Vietnam adalah pusat Kebijakan Baru Selatan Korea Selatan. Tersedia di: <http://hanoitimes.vn/vietnam-central-to-south-koreas-new-southern-policy-chung-eui-> (diakses: 10 Januari 2022).
- Vuving, AL (2014). Vietnam, Amerika Serikat, dan Jepang di Laut Cina Selatan. Pusat Studi Keamanan Asia-Pasifik Daniel K. Inouye. Tersedia di: <http://www.jstor.org/stable/resrep14029> (diakses: 10 Januari 2022).
- Washington Post, 1989. Tiongkok Mengakui Pertempuran dalam Perang Vietnam. Tersedia di: <http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1989/05/17/china-admits-combat-in-vietnam-war/6b9cb8a4-4d18-48bf-80d2-bea80f64057c/?noredirect=on> (diakses: 10 Januari 2022).
- Bank Dunia, (2021). Penanaman Modal Asing 2015-2019. Tersedia di: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=VN>. (diakses: 10 Januari 2022)
- Xuan Dung Phan. (2020). Bagaimana aktivisme diplomatik Abe meningkatkan hubungan Vietnam – Jepang. Tersedia di: <https://www.eastasiaforum.org/2020/09/26/how-abes-diplomatic-activism-elevated-vietnam-japan-ties/> (diakses: 10 Januari 2022).